

ABSTRAK

Noor Amalia. 2024. *Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tapin (Studi Kasus Desa Perintis Raya)*, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., (II) Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemilihan, Pemberhentian, Kepala Desa

Penelitian ini dilatar belakangi karena perlunya simpulan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin di Desa Perintis Raya, sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Perintis Raya Kabupaten Tapin, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan bagaimana proses pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tapin dengan studi kasus di Desa Perintis Raya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, juga disebut penelitian hukum sosiologis maupun penelitian hukum lapangan dimana sumber data yang didapat secara langsung dilapangan dengan proses wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian studi kasus, yang dimaksud dengan studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif mengenai unit sosial tertentu yaitu individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin tahun 2020 di Desa Perintis Raya dilaksanakan secara langsung dan dipilih oleh seluruh masyarakat desa Perintis Raya Kabupaten Tapin, setelah dianalisis maka pelaksanaannya sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014. Dimana tahap-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut: (1) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; (2) mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa; (3) hak memilih dan dipilih; (4) Biaya pemilihan; (5) Pendaftaran, penjaringan, penyaringan dan penetapan calon Kepala Desa; (6) Kampanye pemilihan Kepala Desa; (7) Pemungutan suara; (8) Penghitungan suara; (9) Penetapan calon Kepala Desa; (10) Pengesahan dan pengangkatan calon terpilih; (11) Masa jabatan Kepala Desa. Adapun kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin studi kasus di Desa Perintis Raya, yakni diantaranya adanya permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa terkait biaya pemilihan yang bersumber dari dana kesepakatan bakal calon Kepala Desa.